



Kutai Kartanegara

**Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024**



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

RLPPD merupakan rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang disampaikan Kepala Daerah kepada masyarakat diharapkan memperoleh masukan dan saran peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun mendatang.

RLPPD ini memuat:

- a. Capaian Kinerja Makro;
- b. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar;
- c. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya;
- d. Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. Inovasi Daerah.

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang





diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka Pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per-kapita dan ketimpangan pendapatan. Capaian Kinerja Makro berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, adapun Capaian Laju Kinerja Makro menggunakan rumus sesuai Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Indikator Kinerja Makro sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,95	76,57	0,816
2	Angka Kemiskinan	7,61	7,28	-4,336
3	Angka Pengangguran	4,05	4,11	1,481
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,13	5,62	9,552
5	Pendapatan Perkapita	270,71	259,19	-4,255
6	Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)	0,284	0,307	8,099

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Target Capaian Kinerja Makro pada Dokumen RPJMD 2021-2026, penetapan target indikator pembangunan diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Realisasi Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kutai Kartanegara jika dibandingkan dengan penetapan target Indikator Kinerja Makro pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:





Tabel 2. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro atas Target RPJMD 2021-2026

Indikator	Kondisi Awal	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Pembangunan Manusia	73,59	75,31	75,95	76	76,57	76,2	76,59
Angka Kemiskinan	7,35	7,96	7,61	6,45	7,28	6,4	6,35
Angka Pengangguran	5,2	4,14	4,05	4,4	4,11	4,25	4,1
Pertumbuhan Ekonomi	1,5	3,7	5,13	1,89	5,62	2,4	3
Pendapatan Per kapita	188,64	322,08	270,71	197,62	259,19	202,16	204,69
Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)	0,29	0,269	0,284	0,28	0,307	0,27	0,27

Sampai dengan Tahun 2024 Tahun ke-3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara jika dibandingkan target yang akan dicapai sampai dengan akhir Tahun RPJMD pada Tahun 2026 dari 6 Indikator Kinerja Makro sebagian besar sudah tercapai pada tahun 2024.

2. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Capaian Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar merupakan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut:





Table 1. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	81,85%	80,70%
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,80%	100,22%
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	84,28%	97,21%
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	79,42%	42,81%

Sumber : elppd.kemendagri.go.id

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 senilai Rp. 2.167.389.396.178 atau sebesar 75,51% dari pagu anggaran Rp. 2.870.311.908.63.

Tabel 3. Pelaksanaan Program Bidang Pendidikan

No.	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1.432.054.507.561	863.766.260.489	60%
2	Program Pengembangan Kurikulum	650.000.000	-	0%
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	250.000.000	158.234.600	63%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.437.357.401.070	1.303.464.901.089	91%
Total		2.870.311.908.631	2.167.389.396.178	75,51%

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pelaksanaan urusan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di PAUD.





- 2) Karena bersekolah di jenjang PAUD masih dikenakan biaya yang dianggap memberatkan orang tua siswa karena sebagian besar lembaga PAUD berstatus swasta.
- 3) Kondisi geografis sebagian wilayah Kutai Kartanegara yang sulit dijangkau, juga mempengaruhi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
- 4) Banyak peserta didik yang tidak tercatat di Dapodik karena menempuh pendidikan di Pesantren baik di dalam daerah maupun di luar daerah.
- 5) Masih rendahnya kesadaran penduduk di wilayah tertentu terutama pada wilayah perkebunan dan kampung nelayan untuk kembali bersekolah/ kuliah, masyarakat lebih mementingkan bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

2.2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut:

Table 2. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,07	0,99
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	91,36	93,75
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95,46	90,19
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93,13	98,22
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	87,66	95,16
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,01	97,94





No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	94,24	91,88
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,24	87,83
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00	100,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00	100,00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00	100,00

Sumber : elppd.kemendagri.go.id

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 senilai Rp. 1.778.689.961.207 atau sebesar 86,96% dari pagu anggaran Rp. 2.045.334.803.832.

Tabel 4. Pelaksanaan Program Bidang Kesehatan

No.	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Persentase
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.619.138.900	2.771.672.235	76,58%
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	967.478.549.872	865.411.423.482	89,45%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.022.667.900	4.526.686.672	75,16%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.067.586.333.160	905.498.369.818	84,82%
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	628.114.000	481.809.000	76,71%
Total		2.045.334.803.832	1.778.689.961.207	86,96%





C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pelaksanaan urusan Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam upaya penambahan daya tampung di Rumah Sakit, saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dalam proses pembangunan penambahan ruangan atau tempat daya tampung rumah sakit.
- 2) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain:
 - a. Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksa kehamilan awal (TM1) dan tidak sesuai jadwal
 - b. Kurang keaktifan kader dan bidan mencari informasi tentang ibu hamil dan bersalin
 - c. Masih ada ibu hamil yang periksa di askes lain dan belum melapor ke puskesmas
- 3) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan ibu bersalin antara lain:
 - a. Kurangnya edukasi kepada ibu hamil dan keluarga pentingnya bersalin dengan tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan.
 - b. Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor untuk mendukung persalinan di faskes dan dengan nakes
 - c. Kurang keaktifan kader dan bidan mencari informasi tentang ibu hamil dan bersalin
- 4) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir antara lain:
 - a. Bayi baru lahir dengan BBLR dan bayi tidak bugar (SC, Asfiksia, BBLR/Prematur tidak memungkinkan untuk IMD).
 - b. Masih ada persalinan oleh dukun.





- c. Masih ada tradisi masyarakat/ibu bersalin dan bayi tidak boleh keluar rumah meskipun ke Puskesmas.
 - d. Mobilisasi (berpindah-pindah)/melahirkan di rumah orang tua
 - e. Kurangnya informasi mengenai pelayanan
 - f. Pelayanan yang tidak melaporkan dari fasyankes swasta ke Puskesmas.
 - g. Mendapatkan pelayanan Fasyankes di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota
 - h. Masih ada kematian bayi.
- 5) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan balita antara lain:
- a. Kurangnya kesadaran masyarakat/ibu balita pergi ke Posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balitanya (pertumbuhan minimal 8 kali, pemantauan perkembangan 2 atau 4 kali dalam 2 tahun umur).
 - b. Kurangnya informasi mengenai pelayanan.
 - c. Pelayanan yang tidak dilaporkan dari fasyankes swasta ke Puskesmas.
 - d. Mendapatkan pelayanan fasyankes di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota
 - e. Masih ada kematian Balita
- 6) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar antara lain yaitu:
- a. Ada beberapa sekolah di wilayah kerja yang susah dijangkau karena kondisi alam dan cuaca.
 - b. Masih adanya anakan yang bersekolah di luar wilayah kerja puskesmas.
 - c. Kurangnya tenaga yang melakukan kegiatan ke sekolah, terdapat beberapa sekolah yang muridnya banyak dan memerlukan pemeriksaan lebih dari 1 hari.





- 7) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun antara lain:
 - a. SDM yang kurang kompeten karena seringnya pergantian pengelola program di Puskesmas.
 - b. Koordinasi lintas program dan lintas sektor yang kurang efektif.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan kesehatan.
 - d. Kurangnya edukasi kesehatan.
 - e. Kurangnya perencanaan strategis.
- 8) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan lansia antara lain:
 - a. Masih ada lansia yang belum bisa melakukan pemeriksaan kesehatannya secara mandiri karena mempunyai masalah kesehatan.
 - b. Kurangnya kesadaran lansia terhadap kesehatan dirinya.
 - c. Kurangnya dukungan anggota keluarga lansia untuk periksa kesehatan.
- 9) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi antara lain:
 - a. SDM yang kurang kompeten karena seringnya pergantian pengelolaan program di Puskesmas.
 - b. Kurangnya pemantauan tekanan darah secara teratur bagi penderita hipertensi.
 - c. Keterlambatan dalam pengobatan.
 - d. Kurangnya edukasi kesehatan.
 - e. Kurangnya pemantauan komplikasi hipertensi.
- 10) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan penderita DM antara lain:
 - a. SDM yang kurang kompeten karena seringnya pergantian pengelola program di Puskesmas.





- b. Kurangnya pemantauan gula darah secara teratur bagi penderita Diabetes Melitus.
 - c. Keterlambatan dalam pengobatan.
 - d. Kurangnya edukasi tentang gaya hidup sehat.
 - e. Kurangnya pemantauan komplikasi diabetes melitus.
- 11) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan penderita ODGJ Berat antara lain:
- a. SDM yang kurang kompeten karena seringnya pergantian pengelola program di Puskesmas.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental
 - c. Stigma dan diskriminasi terhadap pasien gangguan jiwa
 - d. Kurangnya pelayanan konseling dan terapi
 - e. Keterlambatan diagnosis dan pengobatan
 - f. Kurangnya partisipasi keluarga dalam pengambilan keputusan
 - g. Kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat.
 - h. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan
- 12) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan penderita TBC Berat antara lain:
- a. Masih kurangnya kemampuan/kapasitas pengelola program dan seringnya pergantian pengelola program di Puskesmas serta adanya tugas rangkap
 - b. Belum optimalnya edukasi tentang penyakit TBC kepada masyarakat.
 - c. Masih kurangnya peran lintas sektor dan lintas OPD
 - d. Masih adanya stigma masyarakat terhadap penderita TBC dan keluarganya
- 13) Kendala yang dihadapi pada pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV antara lain:





- a. Masih kurangnya kemampuan/kapasitas pengelola program dan seringnya pergantian pengelola program di Puskesmas serta adanya tugas rangkap
- b. Belum optimalnya edukasi tentang penyakit HIV kepada masyarakat.
- c. Masih kurangnya peran lintas sektor dan lintas OPD
- d. Masih adanya stigma masyarakat terhadap penderita ODHIV dan keluarganya

2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut:

Table 3. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Tidak Ada Kewenangan Wilayah Sungai	Tidak Ada Kewenangan Wilayah Sungai
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Tidak Ada Kewenangan Wilayah Sungai	Tidak Ada Kewenangan Wilayah Sungai
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,08	70,11
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	82,17	80,20
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83,48	89,10
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	65,49	63,20





No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	3,9	3,43
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	99,83	100

Sumber : elppd.kemendagri.go.id

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 senilai Rp. 3.116.485.204.987 atau sebesar 88,36% dari pagu senilai Rp. 3.526.856.441.816.

Tabel 5. Pelaksanaan Program Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Persentase
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	760.212.920.235	655.188.128.672	86,18%
2	Program Penataan Bangunan Gedung	53.737.850.782	44.818.967.081	83,40%
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	52.929.406.000	49.757.025.631	94,01%
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	100.360.572.514	87.359.170.864	87,05%
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	241.991.674.842	214.559.318.510	88,66%
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	325.980.259.879	261.518.997.749	80,23%
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.600.000.000	1.108.968.725	69,31%
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	422.709.634.124	387.504.205.500	91,67%
9	Program Penyelenggaraan Jalan	1.562.334.123.440	1.409.865.842.309	90,24%
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.000.000.000	4.804.579.946	96,09%
Total		3.526.856.441.816	3.116.485.204.987	88,36%





C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya akses untuk material dan peralatan menuju lokasi kegiatan sehingga pekerjaan terhambat
- 2) Koordinasi dengan pihak penerbit PBG (DPMPTSP) masih belum optimal terkait waktu pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung yang telah terbit IMB/PBG nya
- 3) Pemohon kebanyakan tidak merespons saat dilakukan pemeriksaan bangunan
- 4) Permohonan PBG dilakukan pemohon untuk proses administrasi jual beli, bangunan yang akan diperiksa sudah berpindah tangan, sehingga koordinasi kurang lancar
- 5) Terjadinya pembaharuan SK Ruas Jalan Kabupaten di Tahun 2024, beberapa ruas jalan dilakukan pemutakhiran terhadap panjang dan fungsinya sehingga ada perbedaan jumlah ruas dan panjang jalan kabupaten pada SK jalan kabupaten yang ditetapkan tahun 2016 yang menjadi sasaran kinerja tahun sebelumnya

2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Tidak Ada Terjadi Bencana	Tidak Ada Terjadi Bencana
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	45,87	77,42





No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,89	1,36
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	16,21

Sumber : elppd.kemendagri.go.id

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 senilai Rp. 302.904.593.827 atau sebesar 87,02% dari pagu anggaran senilai Rp. 348.092.830.920.

Tabel 6. Pelaksanaan Program Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Persentase
1	Program Kawasan Permukiman	15.685.660.000	12.496.800.620	79,67%
2	Program Pengembangan Perumahan	9.766.497.560	6.636.506.838	67,95%
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	223.285.524.651	198.794.523.731	89,03%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.655.148.709	56.999.808.228	89,54%
5	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	35.700.000.000	27.976.954.410	78,37%
Total		348.092.830.920	302.904.593.827	87,02%

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Validasi data perumahan dan permukiman (Data Perumahan berupa dokumen RP3KP masih dalam proses reviu oleh Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur)





- 2) Minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat program.
- 3) Validasi dan sinkronisasi data calon penerima bantuan yang melibatkan *stekholder*/pihak-pihak terkait.
- 4) Material sering kali mengalami kelangkaan.
- 5) Penetapan calon penerima bantuan memerlukan proses/waktu yang tidak sebentar dan diperlukan data dukung yang harus dilengkapi sebagai syarat pengajuan permohonan.
- 6) Permasalahan status lahan yang belum jelas.
- 7) Adanya Pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten
- 8) Developer belum menyerahkan aset PSU kepada Pemkab Kukar, masih dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- 9) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU menurun dari Tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan cara hitung, dimana yang dihitung jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang yang terfasilitasi PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sedangkan tahun lalu menggunakan jumlah satuan perumahan yang sudah terfasilitasi PSU.

2.5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (*trantibum*) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut:

Table 4. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Trantibum

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	68,96	100





No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75	61,67
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	76,26	33,71
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,09	0,11
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	91,48	87,72
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	11,04	11,10

Sumber : elppd.kemendagri.go.id

B. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi belanja urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 senilai Rp. 133.300.270.491 atau sebesar 91,29% dari pagu anggaran senilai Rp. 146.015.362.402.

Tabel 7. Pelaksanaan Program Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No.	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Persentase
1	Program Penanggulangan Bencana	7.661.936.560	5.582.152.472	72,86%
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	23.838.144.771	22.757.238.414	95,47%
3	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	17.871.593.836	16.758.632.913	93,77%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96.643.687.235	88.202.246.692	91,27%
Total		146.015.362.402	133.300.270.491	91,29%





C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pelaksanaan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang efektifnya koordinasi dan kolaborasi perangkat daerah teknis atau pemangku perda dan perkara yang memuat sanksi dalam proses penegakan perda dan perkara.
- 2) Penentuan target penerima layanan informasi rawan bencana belum akurat, tidak ada prioritas (Jenis dan Kelas bencana) serta metode sosialisasi bersifat konvensional
- 3) Terbatasnya sumber daya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi
- 4) Pemasangan papan rambu bencana masih terbatas.
- 5) Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih kurang
- 6) Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS)
- 7) Keterbatasan peralatan penyelamatan diri bagi masyarakat dan petugas
- 8) Belum semua jenis bencana tersusun Dokumen Kontingensi (Renkon)
- 9) Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten dan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana)
- 10) Data penduduk di kawasan rawan bencana belum tersusun
- 11) Keterbatasan jumlah petugas dan relawan yang terlatih.
- 12) Keterbatasan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 13) Belum seluruh kecamatan memiliki pos sektor pemadam kebakaran sehingga belum bisa mendekatkan layanan pemadam kebakaran pada tingkat kecamatan secara merata.
- 14) Keterbatasan jumlah dan kualitas Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
- 15) Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- 16) Belum semua desa/kelurahan memiliki relawan pemadam kebakaran
- 17) Kondisi geografis menyulitkan penjangkauan layanan pemadam kebakaran ke daerah terpencil.





2.6. Urusan Sosial

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut:

Table 5. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

Sumber : elppd.kemendagri.go.id

B. Realisasi Belanja Sosial

Realisasi belanja urusan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 senilai Rp.49.049.882.101,00 atau sebesar 82,42% dari pagu anggaran Rp.40.427.692.671,00.

Tabel 8. Pelaksanaan Program Bidang Sosial

No.	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Persentase
1	Program Pemberdayaan Sosial	7.814.000.000	6.842.546.992	87,57%
2	Program Penanganan Bencana	1.360.000.000	1.139.523.722	83,79%
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	50.000.000	36.448.230	72,90%
4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.862.000.000	1.683.186.782	90,40%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.200.938.375	19.376.911.008	83,52%
6	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10.572.980.000	9.530.162.652	90,14%





No.	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Persentase
Total		5.299.105.590	4.931.376.972	93,06%

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pelaksanaan urusan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan SDM Pelayanan Kesejahteraan Sosial: Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Penyuluh Sosial Fungsional dan Penyuluh Sosial Masyarakat sementara kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara sangat luas
- 2) Masih belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam usaha kesejahteraan sosial
- 3) Masih belum optimalnya ketersediaan data kesejahteraan sosial
- 4) Kejadian bencana yang sulit diprediksi sehingga untuk menghitung kebutuhan bantuan makanan dan sandang serta bahan logistik lainnya agak sulit
- 5) Sarana prasarana pelayanan kesejahteraan pada Dinas Sosial masih belum mencukupi

3. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

3.1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.7-6646 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor kinerja 3,1135 dan status kinerja Sedang.





3.2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 31 Desember 2023 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara *unaudited* Tahun Anggaran 2024, Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp.12.702.063.635.451,50 atau 88,75% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.14.312.025.946.608,00 dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.12.808.056.939.981,10 atau 88,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.14.531.000.000.000,00.

Rincian realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dilihat dalam tabel berikut:

Table 6. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	732.901.415.061,00	787.600.170.609,48	107,46%
	Pajak Daerah	160.000.000.000,00	165.870.568.096,40	103,67%
	Retribusi Daerah	7.542.820.000,00	5.879.733.796,00	77,95%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	32.000.000.000,00	88.383.259.737,59	276,20%
	Lain-lain PAD yang Sah	533.358.595.061,00	527.466.608.979,49	98,90%





No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Pendapatan Transfer	13.329.124.531.547,00	11.833.530.509.534,30	88,78%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	12.504.259.028.547,00	11.186.675.996.465,30	89,46%
	Dana Perimbangan	12.274.362.955.547,00	10.956.779.923.465,30	89,27%
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00%
	Dana Desa	195.105.755.000,00	195.105.755.000,00	100,00%
	Intensif Fiskal	34.790.318.000,00	34.790.318.000,00	100,00%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	824.865.503.000,00	646.854.513.069,00	78,42%
	Pendapatan Bagi Hasil	766.425.503.000,00	588.414.513.069,00	76,77%
	Bantuan Keuangan	58.440.000.000,00	58.440.000.000,00	100,00%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	250.000.000.000,00	80.932.955.307,69	32,37%
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perpu	250.000.000.000,00	80.932.955.307,69	32,37%
Total		14.312.025.946.608,00	12.702.063.635.451,50	88,75%

Table 7. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	7.308.463.985.598,24	6.241.519.304.899,94	87,20%
	Belanja Pegawai	2.315.252.391.445,96	2.027.620.403.312,00	87,73%
	Belanja Barang dan Jasa	4.673.176.313.252,26	3.942.510.396.024,94	87,10%
	Belanja Subsidi	134.594.500,00	101.040.120,00	75,07%
	Belanja Hibah	293.603.569.400,02	246.099.465.443,00	83,82%
	Belanja Bantuan Sosial	26.297.117.000,00	25.188.000.000,00	95,78%
2	Belanja Modal	6.088.385.154.796,76	5.289.137.808.823,25	87,30%
	Belanja Modal Tanah	69.771.831.992,00	62.606.649.543,00	89,73%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.485.656.834.108,66	1.276.782.023.180,00	87,71%





No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.961.404.549.197,50	1.646.496.068.022,73	83,94%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.541.849.901.434,60	2.281.781.596.417,52	89,77%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.047.354.497,00	5.811.543.160,00	52,61%
	Belanja Modal Aset Lainnya	18.654.683.567,00	15.659.928.500,00	83,95%
3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
4	Belanja Transfer	1.124.150.859.605,00	1.119.682.510.459,00	99,60%
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab./Kota dan Desa	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00%
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab./Kota Kepada Pemerintah Desa	754.282.000,00	754.282.000,00	100,00%
	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab./Kota	302.828.903,00	0	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kab./Kota Kepada Desa	1.107.093.748.702,00	1.102.928.228.459,00	99,62%
Total		14.531.000.000.000,00	12.808.056.939.981,10	88,14%

Table 8. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	295.974.053.392,00	295.974.053.392,00	100,00%
	- Sisa lebih perhitungan pembayaran tahun sebelumnya	295.974.053.392,00	295.973.787.749,45	100,00%
2	Pengeluaran Pembiayaan	77.000.000.000,00	24.045.000.000,00	31,23%
	- Penyertaan Modal Daerah	77.000.000.000,00	24.045.000.000,00	31,23%
Pembiayaan Netto		218.974.053.392,00	271.928.728.618,00	124,18%





5. Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 77 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah, penerapan inovasi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki inovasi daerah sebagai berikut:

Table 9. Inovasi Daerah

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Judul Inovasi Daerah	Keterangan
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Program Akte Kepengurusan Yayasan Gratis Idaman (PAK KYAI IDAMAN)	
2	Badan Pendapatan Daerah	Sistem Pajak Online, Bangun Tidur Etam Bisa Bayar Pajak (SI PAIJOL BETINJAK)	
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK)	
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Online	
5	Dinas Kesehatan	Indeks Rujukan	
6	Dinas Kesehatan	Skrining Kasus dan Deteksi Dini Pre-Eklamsia (SRIKANDIE)	
7	Dinas Kesehatan	e-SIK (Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Pembantu Dan Klinik)	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sistem Pencairan Keuangan Desa (SIPACAR KUDA)	
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Inovasi Dagang Kemitraan (IDAMAN)	
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Komunitas Belajar Kukar Pintar Idaman (KBKPI)	
11	Dinas Pertanian dan Peternakan	SODITANI (Solar Subsidi Bagi Petani)	
12	Satuan Polisi Pamong Praja	Siaga 24 (Sistem Informasi Aduan Warga 24 Jam)	
13	RSUD. Aji Muhammad Parikesit	SOBAT PARIKESIT (Sistem Pengantaran Obat Parikesit)	





No	Pelaksana Inovasi Daerah	Judul Inovasi Daerah	Keterangan
14	RSUD. DAYAKU RAJA Kota Bangun	SI IDAMAN (Sistem Informasi Interaksi Dini Maternal)	
15	Kecamatan Marangkayu	Rumah Edukasi Kita (RAKIT)	
16	Kecamatan Samboja	Kawasan Masyarakat Pertanian Unggulan Rakyat Sejahtera Mandiri Pangan (Kampung Raja Mapan) Joglo Tani Kolong Langit	
17	Kecamatan Samboja Barat	Pusat Informasi Wisata Samboja Barat (PATIN WISAMBAR)	
18	Kecamatan Sangasanga	Rumah Sampah Sementara Kecamatan Sangasanga (Russa Emas)	
19	Kecamatan Tenggarong	“Gerakan Mandira (Maju, Mandiri dan Sejahtera)” Inovasi dari Kelompok Wanita Tani Kecamatan Tenggarong.	
20	Kelurahan Handil Baru Darat	Jemput, Input dan Ambilkan Kartu Identitas Anak (Jemputan KIA)	
21	Kelurahan Panji	Lahan Terbengkalai Jadi Taman Terbuka Hijau (Lentera Hijau)” Inovasi dari Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong.	
22	Puskesmas Badak Baru Kecamatan Muara Badak	“Cap Jempol” Inovasi dari Puskesmas Badak Baru.	
23	Puskesmas Jonggon Kecamatan Loa Kulu	Survey PHBS Berbasis Online	
24	Puskesmas Kahala Kecamatan Kenohan	Kerakatan Bidan Kan Penguling (KEBIDAN)	
25	Puskesmas Loa Janan Kecamatan Loa Janan	Posyandu Sehat dan Gembira (POS SEGER)	
26	Puskesmas Muara Wis Kecamatan Muara Wis	NJARING PATIN (meNJaga daRah tlnggi deNGan PengobAtan ruTIN)	
27	Puskesmas Perangat Kecamatan Marangkayu	Alarm Merah Kuning KeraPutri	
28	Puskesmas Sangasanga Kecamatan Sangasanga	e-PANTAS	



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Judul Inovasi Daerah	Keterangan
29	Puskesmas Sangasanga Kecamatan Sangasanga	GESIT SALES (Gerakan Sadar periksa Iva Tes dan Sedanis reproduksi Lebih Sehat)	
30	Puskesmas Sebulu I Kecamatan Sebulu	"Bestie Ku TBC (Bersama Terintegrasi Mendukung Eliminasi TBC)" Inovasi dari Puskesmas Sebulu I;	
31	Puskesmas Sungai Meriam Kecamatan Anggana	"Kampung KIA Hanter (Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak Desa Handil Terusan)" Inovasi dari Puskesmas Sungai Mariam	
32	Desa Batuah Kecamatan Loa Janan	Gerakan Merdeka Air Bersih Lewat PAMSIMAS (GEMERLAP)	
33	Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun	Desa Ramah Anak Idaman (DRAMA IDAMAN)	
34	Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu	Solusi Pertanian BUMDesa Sumber Purnama (SINAR PURNAMA)	
35	Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis	Forum Peduli Masyarakat Sehat (FPMS) Tulak Becari	
36	Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis	Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam (KLIK ME)	
37	Desa Saliki Kecamatan Muara Badak	Water Supply Sistem (WSS) Desa Saliki	
38	Desa Sukamaju Kecamatan Tenggara Seberang	Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Paving Block	
39	Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu	Kemitraan BUMDesa dan Masyarakat Desa Sungai Payang (MABUK KEPAYANG)	
40	SMPN 6 Loa Janan	Ekskul Siswa Pembelajaran Berbasis Proyek	

Bupati Kutai Kartanegara

Drs. Edi Damansyah, M.Si



Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara

RLPPD 2024

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2024